

TRANSFER PRICING INDONESIA

IAI Regular Tax Discussion
Jakarta, 18 Juli 2019

KEYNOTE SPEECH BY:
PROF. P.M. JOHN L. HUTAGAOL



CURRICULUM VITAE

Name : Prof. Dr. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol,
M.Acc., M.Ec.(Hons.), S.E., Ak., C.A.

Place/Date of Birth : Jakarta, 27 November 1965

Office Address : Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta



I. Job Title

- ❖ Head of Tax Office Foreign Direct Investment One (2009-2011)
- ❖ Advisor for Tax Services (2011-2011)
- ❖ Advisor for Tax Law Enforcement (2011-2012)
- ❖ Director of Tax Regulation II (2012-2016)
- ❖ Director of International Taxation (2016-now)

II. Education

- ❖ Bachelor of Economics (University of Brawijaya, Malang) – 1988
- ❖ Master of Economics in Accountancy (University of Macquarie, Sydney) – 1994
- ❖ Master of Economics by Research (University of Macquarie, Sydney) – 1995
- ❖ PhD in Business Management (University of Padjadjaran, Bandung) – 2004

III. Professional Expertise

- ❖ Indonesian Competent Authority, 2012 – now
- ❖ Professor in Taxation (PERBANAS), 2008 – now
- ❖ Chairman of Board Advisor of ATPETSI, 2018 – 2022
- ❖ Chairman of KAPj IAI, 2018 – 2020
- ❖ Head of Indonesian Delegation for MAP, 2012 – now

DASAR HUKUM TERKAIT TP

Pasal 18 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 36 tahun 2008

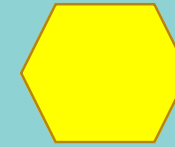
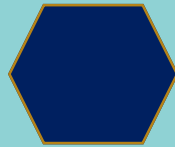
tentang

Pajak Penghasilan

Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 42 Tahun 2009

tentang

PPN dan PPnBM



Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 s.t.d.d PER-32/PJ/2011

tentang

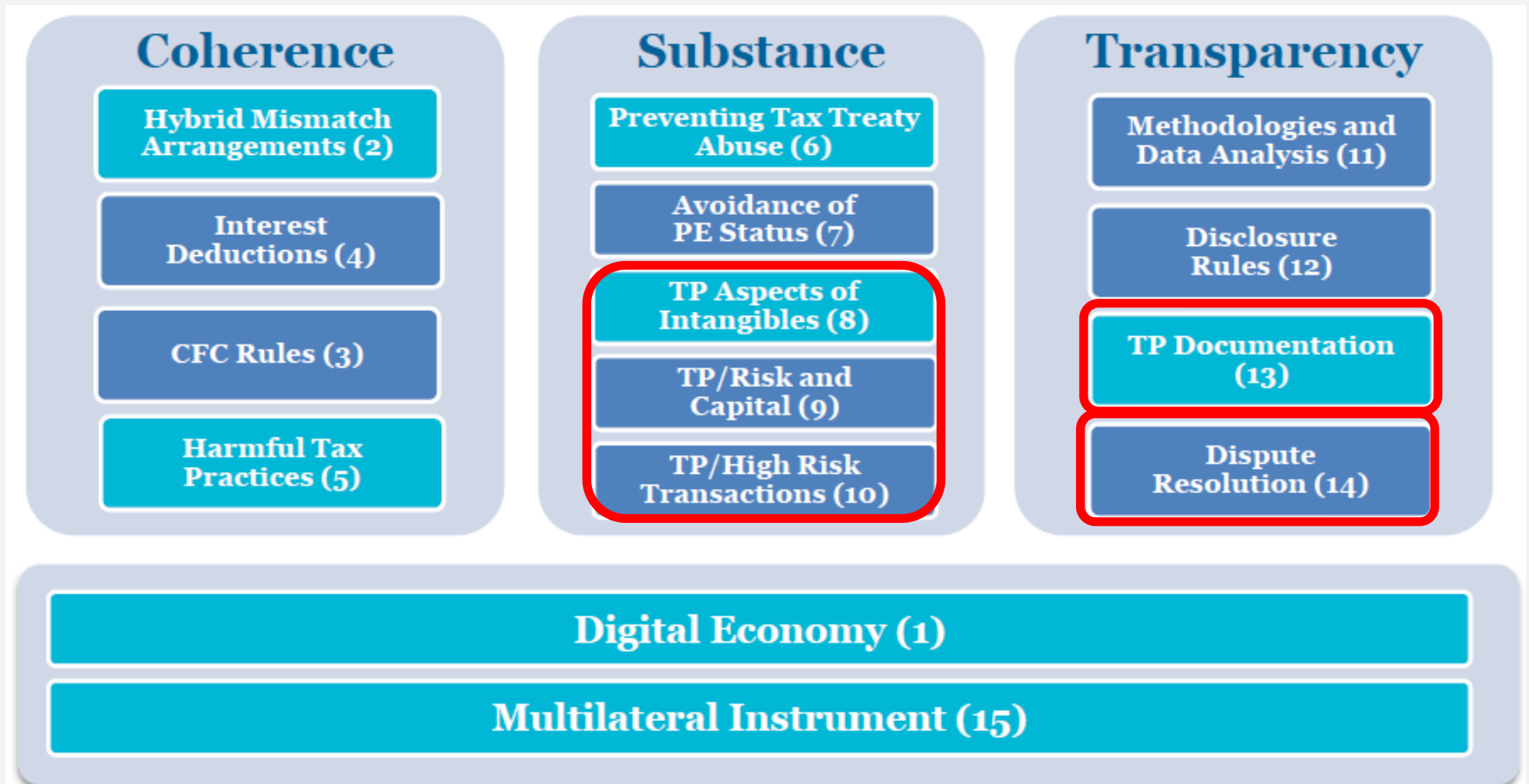
Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-213/PMK.03/2016

tentang

Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya

BEPS PROJECT



Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation

ACTIONS 8-10: 2015 Final Reports

ACTION 8 – INTANGIBLES

- Transaksi terkait *intangibles* berkontribusi terhadap BEPS yang pada akhirnya menyebabkan alokasi profit yang

ACTION 9 – RISKS & CAPITAL

- Aktivitas yang secara nyata dilakukan seringkali berbeda dengan yang tercantum di dalam kontrak, sehingga pada akhirnya alokasi resiko menjadi tidak tepat. (*contract vs conduct*)

ACTION 10 - HIGH-RISK TRANSACTIONS

- Transaksi afiliasi yang tidak rasional secara komersial
- Pemilihan metode TP yang semata-mata hanya untuk memperkecil pengalokasian laba
- Penggunaan pembayaran-pembayaran tertentu (cth: *management fees* dan *head office expenses*) untuk mengikis basis pajak

ACTION 13 – TP DOC

- Pengembangan peraturan dan panduan untuk menjamin ketersediaan informasi terkait MNE's, meliputi:
 - alokasi penghasilan secara global,
 - aktivitas ekonomi, dan
 - Pajak yang dibayarkan di tiap-tiap negara sesuai dengan

Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting





ACTION 14 – DISPUTE RESOLUTION

- Sengketa terkait TP, selain dapat diselesaikan melalui jalur domestic (keberatan & banding), juga dapat diselesaikan melalui *Mutual Agreement Procedure* (MAP)
- *Advance Pricing*

TANTANGAN

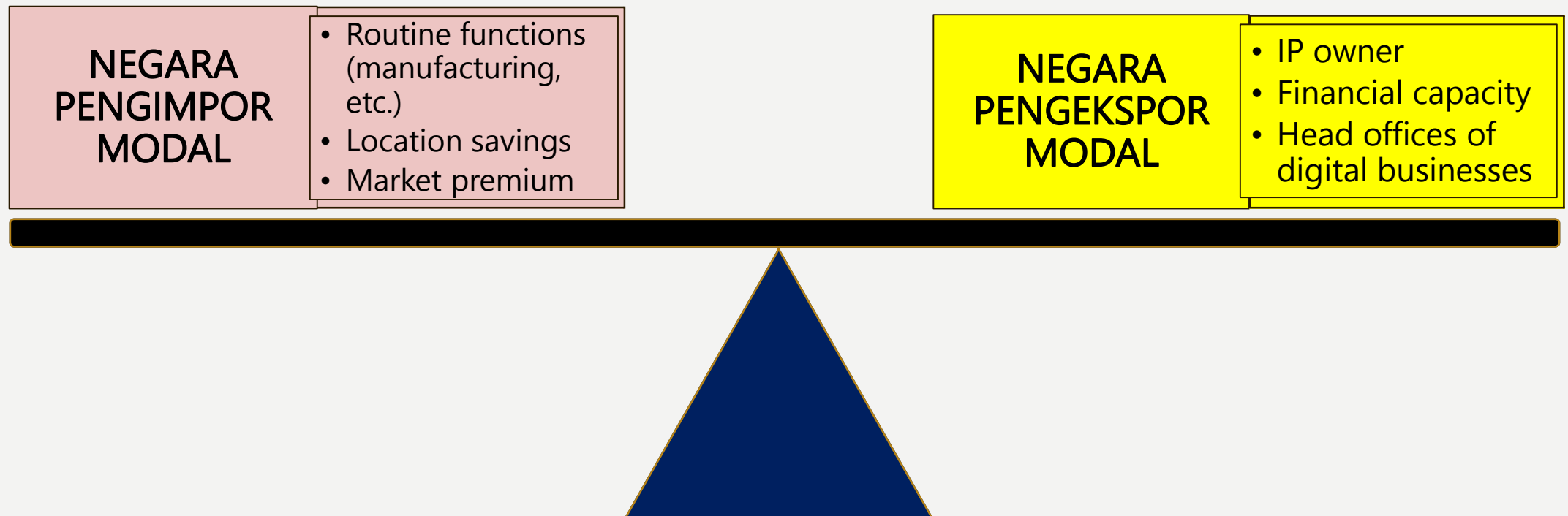
DIGITAL ECONOMY

- Ketergantungan yang tinggi terhadap *intangible assets*
- Penggunaan data dalam jumlah yang sangat masif
- Semakin bervariasinya model bisnis seiring

Bagaimana cara mengidentifikasi dan menilai kontribusi masing-masing pihak?

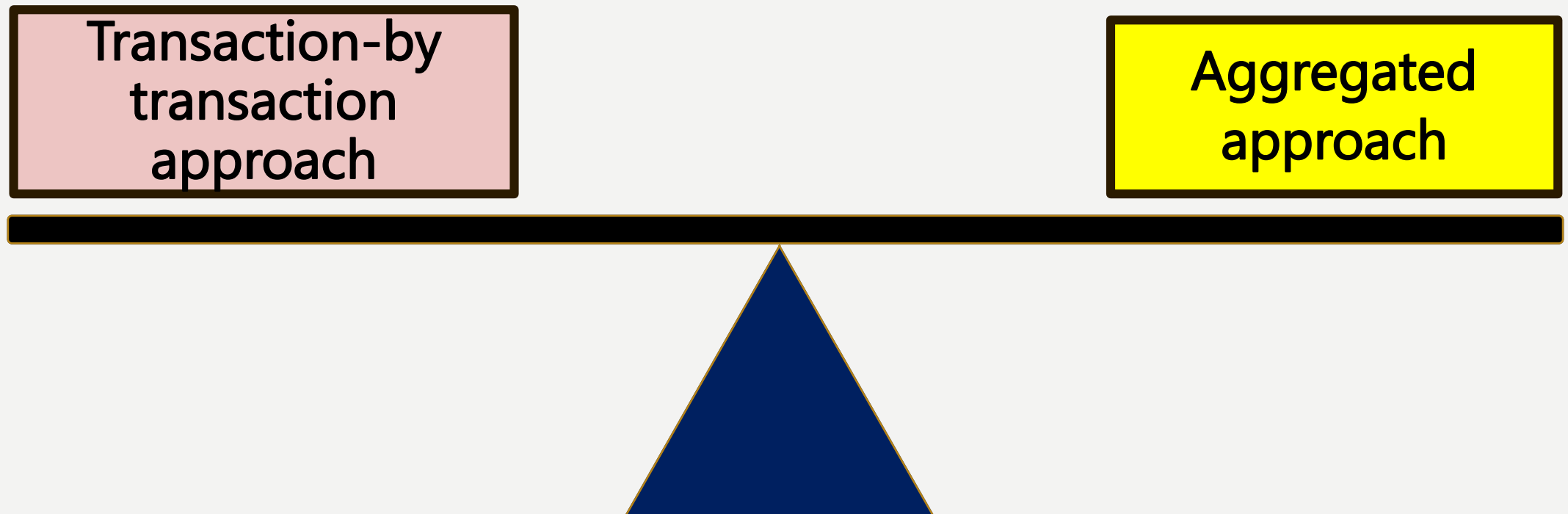
PERMASALAHAN

ALOKASI PROFIT



PERMASALAHAN

PENDEKATAN PENGUJIAN



PERMASALAHAN

METODE TP

CUP

Resale
Price

Cost plus

Profit Split

TNMM

Others

Profit split method sepertinya tidak pernah digunakan WP krn entitas Indonesia selalu dianggap melakukan fungsi rutin.

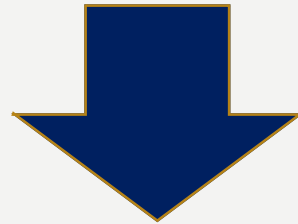
PEER REVIEW BEPS ACTION 14 (MAP)

- ✓ *Stage 1 Peer Review Report* Indonesia telah disetujui oleh FTA MAP Forum
- ✓ Indonesia telah memenuhi standar minimum yang dipersyaratkan dalam BEPS Aksi 14



AREA PERBAIKAN UTAMA

Ketersediaan *roll-back* dalam kasus BAPA



Secara praktis dan sesuai PMK MAP, *roll-back* bisa dan pernah dilaksanakan

Sedang dalam proses revisi PMK APA

